



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA RESES  
KOMISI VIII DPR RI  
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022  
TANGGAL 17- 21 DESEMBER 2021**



Sekretariat Komisi VIII DPR RI  
Set\_komisi8@dpr.go.id

**JAKARTA**

# TAHUN 2021

## DAFTAR ISI

JADWAL ACARA KUNJUNGAN KERJA

DAFTAR ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA

### BAB I

PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Dasar Kunjungan Kerja
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Obyek Kunjungan Kerja

### BAB II

KUNJUNGAN KERJA KE SUMATERA SELATAN

- A. Peninjauan ke Asrama Haji Palembang
- B. Peninjauan ke BRSPDF Budi Perkasa Palembang
- C. Pertemuan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan
- D. Peninjauan ke MAN 3 Palembang

### BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

### BAB IV

PENUTUP



**DAFTAR NAMA ANGGOTA  
TIM KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI  
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022  
TANGGAL 17-21 DESEMBER 2021**

| NOMOR |       | N A M A  | JABATAN   | FRAKSI       | DAPIL         |
|-------|-------|--|-----------|--------------|---------------|
| URUT  | ANG   |  |           |              |               |
| 1.    | A-03  | H. MARWAN<br>DASOPANG                            | Ketua Tim | P K B        | SUMUT II      |
| 2.    | A-211 | I KOMANG KOHERI,<br>S.E.                         | Anggota   | PDIP         | LAMPUNG<br>II |
| 3.    | A-275 | Drs. H. HASAN<br>BASRI AGUS, M.M.                | Anggota   | P G          | JAMBI         |
| 4.    | A-298 | Hj. ITJE SITI DEWI<br>KURAESIN, S.Sos.,<br>M.M.  | Anggota   | P G          | JABAR IX      |
| 5.    | A-346 | Dra. Hj. IDAH<br>SYAHIDAH RUSLI<br>HABIBIE, M.H. | Anggota   | P G          | GORON<br>TALO |
| 6.    | A-062 | M. HUSNI, S.E                                    | Anggota   | GERIN<br>DRA | SUMUT I       |
| 7.    | A-124 | H. IWAN<br>KURNIAWAN, S.H.,<br>M.Si.             | Anggota   | GERIN<br>DRA | KALTENG       |
| 8.    | A-351 | Dra. DELMERIA                                    | Anggota   | NASDEM       | SUMUT II      |
| 9.    | A-34  | Dra. Hj. ANISAH<br>SYAKUR                        | Anggota   | P K B        | JATIM II      |
| 10.   | A-434 | Hj. NUR AZIZAH<br>TAMHID, B.A., M.A.             | Anggota   | P K S        | JABAR VI      |

|     |       |                                 |                               |       |            |
|-----|-------|---------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| 11. | A-440 | KH. BUKHORI, L.c.,<br>M.A.      | Anggota                       | P K S | JATENG I   |
| 12. | A-510 | H. MUHAMMAD<br>RIZAL, SH., M.SI | Anggota                       | P A N | BANTEN III |
| 13. | -     | AGUS<br>WIDIJATMOKO, S.H.       | SEKRETARIAT KOMISI VIII       |       |            |
| 14. | -     | HERU PRIBADI,<br>S.A.P.         | SEKRETARIAT KOMISI VIII       |       |            |
| 15. | -     | INAH ROFIKHOH                   | SEKRETARIAT KOMISI VIII       |       |            |
| 16. | -     | MOHAMMAD<br>HASYIM, S.S., M.Si. | TENAGA AHLI KOMISI VIII       |       |            |
| 17. | -     | TAUFAN<br>SYAHRULLI             | MEDIA CETAK DAN SOSIAL DPR RI |       |            |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 telah membentuk Tim Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

### **B. Dasar Kunjungan Kerja**

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 98 Ayat (4) huruf f. tentang Tugas Komisi di Bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2020 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
  - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan
  - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada Masa Reses.
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud
  - a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana.
  - b. Melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Tujuan
  - a. Secara umum untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana di daerah.

- b. Secara khusus untuk memperoleh informasi mengenai kinerja Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Sosial Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**D. Obyek Kunjungan Kerja**

Obyek Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 adalah:

1. Melakukan peninjauan ke Asrama Haji Palembang terkait persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M.
2. Melakukan peninjauan ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Budi Perkasa Palembang untuk menyerahkan bantuan.
3. Melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Plt. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dihadiri pula oleh pejabat dari Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Badan Amil Zakat Nasional.
4. Melakukan peninjauan ke MAN 3 Palembang untuk memantau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

## **BAB II**

### **KUNJUNGAN KERJA KE SUMATERA SELATAN**

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI berkumpul di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada hari Jumat 17 Desember 2021 Pukul 05.10 WIB. Pesawat *take off* dari Bandara Internasional Soekarno Hatta Pukul 06.10 WIB dan *landing* di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Pukul 07.15 WIB.

Begitu tiba di Ruang VIP Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI disambut oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Pemprov Sumatera Selatan DR. H. Rosidin Hasan, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan H. Deni Priansyah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Mirwansyah, SKM., MKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Henny Yulianti, S.IP., MM., dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Iriansyah, S.Sos., SKM., M.Kes.

#### **A. Peninjauan ke Asrama Haji Palembang**

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI tiba di Asrama Haji Palembang di Jalan Kolonel Barlian KM 9,5 dengan disambut oleh Direktur PT. Swarna Dwipa Sumsel atau BUMD yang mengelola asrama haji, yakni Rebo Iskandar Pohan, S.Pd. Tim kemudian melakukan audiensi dan peninjauan lapangan ke berbagai fasilitas di Asrama Haji Palembang dengan catatan sebagai berikut:

1. Asrama Haji Palembang merupakan asrama haji yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui BUMD Sumsel, yaitu PT. Swarna Dwipa Sumsel. Sebelumnya Pemprov Sumsel harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 5-10 Miliar per tahun untuk operasional Asrama Haji Palembang. Namun setelah diserahkan kepada PT. Swarna Dwipa Sumsel pada tahun 2004, Pemprov tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk operasional asrama haji bahkan asrama haji menyumbangkan pendapatan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel.
2. Asrama Haji Palembang berdiri sejak tahun 1998 di atas lahan seluas 4 hektare dan kini berkembang menjadi 8 hektare, dengan kapasitas 278 kamar dan 7 gedung yang mampu menampung penginapan untuk 1.000 orang. Namun legalitas tanah Asrama Haji Palembang ini sebagian masih tumpang-tindih dengan kepemilikan TNI Angkatan Udara yang menguasai

kawasan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

3. Asrama Haji Palembang memiliki fasilitas yang lengkap sebagai embarkasi haji, mulai dari lokasi asrama haji yang dekat ke bandara, tempat parkir yang luas, penginapan yang besar, *mock up* pesawat untuk jamaah yang sama sekali belum pernah naik pesawat terbang, miniatur Ka'bah yang besar, hingga sarana untuk Sa'i berupa jalan antara Safa ke Marwah.
4. Asrama Haji Palembang selain mempunyai kewajiban untuk memberikan keuntungan finansial kepada Pemprov Sumsel juga memiliki tanggung jawab sosial, seperti memfasilitasi penginapan untuk para petugas TNI/Polri yang bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau menjadikan asrama haji sebagai tempat isolasi bagi pasien Covid-19 di wilayah Sumsel.
5. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI mendorong agar Asrama Haji Palembang meningkatkan pelayanannya tidak hanya untuk jamaah haji pada musim haji melainkan juga jamaah umrah dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

#### B. Peninjauan ke BRSPDF Budi Perkasa Palembang

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI tiba di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Budi Perkasa Palembang di Jalan Sosial Kota Palembang, disambut oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Drs. Andi Hanindito, M.Si., Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel Mirwansyah, SKM., MKM dan Kepala BRSPDF Budi Perkasa, Iwan Nurchandra Setiawan, beserta para jajarannya.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI kemudian melakukan audiensi dan penyerahan bantuan simbolis kepada BRSPDF Budi Perkasa dengan catatan sebagai berikut:

1. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI mengharapkan BRSPDF Budi Perkasa meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Cq. Dinas Sosial Provinsi Sumsel karena mereka yang lebih tahu mengenai jumlah penyandang disabilitas di wilayah Sumsel.
2. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI mendorong BRSPDF Budi Perkasa meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada para penyandang disabilitas fisik guna memulihkan kembali keberfungsian sosial mereka.
3. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI menekankan perlunya BRSPDF Budi Perkasa Palembang menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan, misalnya memberikan kaki palsu kepada penyandang disabilitas fisik yang tidak memiliki kaki untuk mengembalikan keberfungsian fisiknya.

4. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan kepada BRSPDF Budi Perkasa berupa:
  - a) Bantuan Atensi Motor Viar roda 3 modifikasi tipe kelontong Penerima Sujirman senilai Rp33.052.000.-
  - b) Bantuan Atensi Modal Usaha dan kebutuhan Dasar Penerima LKS Netra Mandiri.
  - c) Bantuan Atensi Kursi Roda Standar Penerima Junaidi senilai Rp2.000.000,-
  - d) Bantuan Atensi Alat Bantu Protesa Tangan Penerima M Darliansyah.
  - e) Bantuan Atensi Modal Usaha Bengkel Penerima Amri Yulius senilai Rp10.000.000,-
  - f) Bantuan Atensi Kebutuhan Dasar Penerima Zainuddin senilai Rp1.500.000,-

C. Pertemuan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI tiba di Kantor Gubernur Sumatera Selatan dengan diterima oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya, didampingi oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumsel H. Deni Priansyah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Mirwansyah, SKM., MKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Henny Yulianti, S.IP., MM., Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Iriansyah, S.Sos., SKM., M.Kes, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Selain itu juga hadir Mitra-mitra Komisi VIII DPR RI dari Jakarta seperti Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama RI H. Saiful Mujab, MA., Plt. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kementerian Sosial RI Endang Muryani, Aks., M.Si., Asisten Deputi Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Endah Sri Rejeki, SEM.IDEA., Ph.D., Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ir. Ibnu Asur, MM., Deputi Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Pengelola Keuangan Haji Ahmad Zaky, MBA., dan Kepala Bagian Ekonomi Badan Amil Zakat Nasional Eka Budhy Sulistyono.

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai tema terkait dengan agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pengelolaan Asrama Haji Palembang yang sudah cukup baik dan dapat menjadi *role model* bagi pengelolaan asrama haji di Indonesia. Sebelumnya Komisi VIII DPR RI belum pernah mengunjungi Asrama Haji Palembang karena tidak dikelola oleh Kementerian Agama RI dan akan membujuk Pemprov Sumsel untuk menyerahkan pengelolaannya kepada

Kementerian Agama RI, tapi setelah Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI meninjau Asrama Haji Palembang maka Komisi VIII DPR RI berkesimpulan bahwa pengelolaan Asrama Haji Palembang sudah cukup baik dan akan lebih tepat jika tetap ditangani oleh Pemprov Sumsel.

2. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI mendorong Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumsel untuk memastikan agar pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di 1.822 madrasah dan 457 pondok pesantren se-Sumsel dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan protokol kesehatan demi menjaga dan melindungi kesehatan siswa-siswi dan santri-santriwati.
3. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI menekankan agar bantuan sosial yang digelontorkan ke Provinsi Sumsel benar-benar efektif, misalnya dengan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 324.853 KPM, Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako kepada 441.394 KPM dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 116.519 KPM seharusnya dapat berimpilasi pada penurunan angka kemiskinan di Sumsel.
4. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI mendukung perlawanan terhadap kejahatan seksual, seperti mendorong proses pembahasan RUU mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan mendesak Kementerian Agama RI untuk mendayagunakan sumber daya para penyuluh agar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perlunya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak.
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan telah bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam memitigasi keadaan cuaca dan dampak La-Nina pada akhir tahun 2021 ini. Berdasarkan hasil kajian BMKG diketahui bahwa curah hujan akan meningkat mulai dari bulan November 2021 hingga Januari 2022 sehingga semua kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan diminta untuk menyiapkan personil dan peralatan dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Langkah kesiapsiagaan bencana yang sudah dilakukan BPBD Sumsel antara lain penyusunan rencana penanggulangan bencana, mitigasi bencana, pengendalian operasi dan penyiapan sarana/prasarana kesiapsiagaan bencana, penguatan kapasitas penanggulangan bencana, penyusunan rencana kontigensi dan penanganan pasca bencana.
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat Cq. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengalokasikan anggaran khusus penanggulangan bencana sebagaimana dicantumkan dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana, termasuk perlunya anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang rutin terjadi setiap tahun.

7. Kurva penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada tiga bulan terakhir ini mengalami penurunan secara signifikan di mana kasus aktif hanya tinggal 29 kasus (0,05 persen) dari total kasus dari total kasus Covid-19 di Sumsel yang sampai 15 Desember 2021 mencapai 59.967 kasus. Sementara jumlah vaksin yang sudah diterima Pemprov Sumsel mencapai 7.828.100 dosis atau sekitar 61,64 persen dari total kebutuhan vaksin di Sumsel.
8. Terhadap usulan dari BPBD Sumsel agar anggaran penanggulangan Karhutla juga dianggarkan dari Dana Siap Pakai (DSP) untuk pasukan pemadam di darat, BNPB berpedoman pada Instruksi Mendagri mengenai optimalisasi dana dari daerah. Namun apabila daerah sudah tidak memiliki anggaran maka BPBD dapat mengajukan penggunaan DSP ke BNPB.

D. Peninjaun ke MAN 3 Palembang

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI tiba di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang di Jalan Ir. Marzuki Kota Palembang dengan disambut oleh Plt. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel H. Deni Priansyah, S.Ag., M.Pd.I., Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Bekti Indramaji, S.Pi., Kepala MAN 3 Palembang Hj. Komariyah Hawa, M.Pd.I., dan jajarannya.

Dalam pertemuan dan peninjaun terhadap pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di MAN 3 Palembang dapat diketahui:

1. Pelaksanaan PTM di MAN 3 Palembang dilakukan secara *hybrid* atau *blended* yakni gabungan antara pembelajaran secara *off line* di kelas sebanyak 50 persen dan pembelajaran secara *on line* atau daring sebanyak 50 persen dengan dukungan teknologi telekonferensi.
2. Animo masyarakat di sekitar Palembang untuk bersekolah di MAN 3 Palembang sangat tinggi karena dari kuota yang dialokasikan sebanyak 200-300 siswa/siswi per tahun ternyata yang mendaftar bisa mencapai 2.000 siswa/siswi. Hal ini tidak terlepas dari kualitas pendidikan di MAN 3 Palembang yang relatif cukup baik sehingga banyak lulusannya yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia bahkan hingga ke perguruan tinggi favorit di luar negeri.
3. Kurikulum pendidikan yang diberikan di MAN 3 Palembang tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) melainkan juga iman dan takwa (Imtaq) sehingga lulusan MAN 3 Palembang memiliki keseimbangan antara wawasan dan pengetahuan dengan fondasi keimanan dan ketakwaan.
4. Meskipun memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, MAN 3 Palembang masih membutuhkan dukungan untuk perbaikan asrama santri yang kondisinya kurang memadai dan sering banjir. Oleh sebab itu MAN 3 Palembang memohon bantuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama RI agar dapat merenovasi asrama yang dikhususnya bagi santri yang bermukim di lingkungan MAN 3 Palembang.

### **BAB III**

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan secara umum berjalan baik dan lancar berkat dukungan dan kerjasama dari Pemprov Sumsel dan jajarannya dengan kesimpulan sebagai berikut.

1. Peninjauan ke Asrama Haji Palembang yang dikelola oleh BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil menemukan model pengelolaan asrama yang efisien, berorientasi pada pelayanan jamaah, memiliki fasilitas yang lengkap dan menguntungkan secara finansial.
2. Peninjauan ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Budi Perkasa Palembang menemukan pentingnya berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Sumsel terkait dengan jumlah dan kebutuhan penyandang disabilitas fisik.
3. Pertemuan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan dengan *stakeholders* membahas berbagai hal yang terkait dengan pembangunan program di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana.
4. Peninjauan ke MAN 3 Palembang untuk memastikan bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Madrasah-madrasah dan pesantren di Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan secara *hybrid* antara *on line*/daring dan *off line*/luring.

#### **B. Rekomendasi**

Dari hasil kunjungan reses Komisi VIII DPR RI ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ini dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya mengkomunikasikan kepada pihak TNI Angkatan Udara terkait dengan kepemilikan lahan Asrama Haji Palembang yang masih tumpang-tindih antara lahan yang dimiliki oleh Pemprov Sumsel selaku pemilik asrama haji dengan TNI AU yang menguasai kawasan Bandara Sultan

Mahmud Badaruddin II Palembang. Komunikasi ini penting untuk mencari solusi terbaik agar ada kejelasan mengenai batas-batas wilayah yang dimiliki Pemprov Sumsel dengan wilayah yang dimiliki TNI AU.

2. Perlunya mengajukan proposal mengenai pembangunan dan perbaikan asrama santri di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang karena sudah tidak layak dengan atap yang bocor dan sering terendam banjir apabila hujan deras. Oleh sebab itu MAN 3 Palembang direkomendasikan untuk segera mengajukan proposal pembangunan dan perbaikan asrama santri kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ini disusun sebagai bahan masukan dalam rangka menjalankan Fungsi Pengawasan di Komisi VIII DPR RI.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**H. MARWAN DASOPANG, M.Si**

## **FOTO-FOTO KUNJUNGAN KERJA RESES**



*Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang menyerahkan bantuan kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kantor Gubernur Sumatera Selatan.*



*Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI mengunjungi fasilitas mock up pesawat di lingkungan Asrama Haji Palembang.*

## **FOTO-FOTO KUNJUNGAN KERJA RESES**



*Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang berfoto Bersama para pengelola Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Budi Perkasa Palembang.*



*Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI berfoto bersama Kepala MAN 3 Palembang beserta para guru dan jajaran pengajar lainnya.*